

Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

Santi Merlinda¹ Ermita Yusida, Muhammad Hasyim Ibnu Abbas, Agus Sumanto

Keywords :

Pelatihan;
Perencanaan Pembangunan;
RKPDDes.

Correspondensi Author

Ekonomi Pembangunan,
Universitas Negeri Malang
Jl. Nusa Indah II Tumpang,
Malang
Email: santi.merlinda.fe@um.ac.id

History Article

Received: 28-10-2020;
Reviewed: 02-12-2020;
Accepted: 15-03-2021;
Available Online: 10-04-2021;
Published: 15-4-2021;

Abstract. Community service activities in the form of assistance and training for the preparation of RKPDDes for government and community elements in Benjor Village aim to improve comprehensive development planning to achieve development goals. The method used was dissemination and training from the implementation team accompanied by practical activity programming. The results achieved in this activity were implementing training activities and assistance for the preparation of the RKP for Benjor Village. Through this activity, the participant's understanding of the preparation of the RKPDDes increased, as evidenced by the ability to formulate programs and activities with targets based on development priorities. Additionally, there was also criticism of the 2020 planning document in this activity, which could be used as input for the development planning document for the following year. Overall, most of the participants stated that this training was helpful and that assistance was needed to prepare the RKPDDes.

Abstrak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan dan pelatihan penyusunan RKPDDes untuk unsur pemerintah dan masyarakat Desa Benjor bertujuan meningkatkan perencanaan pembangunan yang komprehensif agar tujuan pembangunan bisa tercapai. Metode yang digunakan adalah desiminasi dan pelatihan dari tim pelaksana disertai dengan praktik penyusunan program kegiatan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan RKP Desa Benjor. Melalui kegiatan ini, pemahaman para peserta pelatihan terhadap penyusunan RKPDDes semakin meningkat, dibuktikan dengan kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan disertai target, berdasarkan prioritas pembangunan. Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilakukan kritisan terhadap dokumen perencanaan tahun 2020, yang dapat menjadi masukan untuk dokumen perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya. Secara keseluruhan, sebagian besar peserta menyatakan bahwa pelatihan ini bermanfaat dan perlu ada pendampingan dalam penyusunan RKPDDes.

PENDAHULUAN

Perencanaan adalah tahapan awal dan memiliki peran krusial dalam proses pembangunan. Dari proses perencanaan, akan ditetapkan target dan tujuan pembangunan. Perencanaan pembangunan dilakukan pada seluruh level pemerintah, mulai dari desa sampai nasional. Pada level pemerintah desa, pengelolaan desa memiliki fungsi vital sebagai unit pemerintah terdekat dengan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan dan perencanaan yang jelas (Khoeriyah, 2020). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes), tujuannya untuk mengumpulkan informasi terkait permasalahan dan kebutuhan masyarakat, yang akan menjadi masukan untuk kebijakan pembangunan (Winarno, 2007). Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program desa sangat penting untuk mendukung tercapainya kemajuan Desa seperti keadilan, kewenangan Desa, kebutuhan prioritas, serta partisipatif swakelola yang berbasis tipologi dan sumber daya Desa (Garis, 2017). Penggalan kebutuhan dan permasalahan masyarakat menurut Supeno (2011) merupakan bagian dari proses perencanaan desa. Senada dengan Supeno (2011), Tarigan (2009) juga menyebutkan beberapa dasar perencanaan, antara lain meliputi (1) identifikasi, (2) pengalokasian sumber daya, (3) tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dan (4) fokus pada masa depan.

Perencanaan merupakan tahapan awal, dasar dan langkah penting dalam proses pembangunan. Dalam proses perencanaan, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memajukan perekonomian wilayahnya (Arsyad, 2002). Perencanaan pembangunan dilakukan oleh semua level pemerintahan, mulai dari tingkatan Nasional sampai dengan Desa. Perencanaan pembangunan dilakukan dalam tahap jangka Panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan tahunan diimplementasikan dalam RKP, dalam tingkat desa diimplementasikan dalam RKP Desa (Srirejeki, 2015) (Wulandari, 2017). RKPDes disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes) yang dibuat setiap enam tahun sekali (Purbasari, D, & Habibah, 2018). RPJMDes berisi kebijakan dan strategi pembangunan Desa, program prioritas desa kewilayahan dan arah kebijakan keuangan Desa, serta rencana kerja (Ariadi, 2019).

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat tentang kebijakan tahunan di Desa (Cristian, 2015). Rencana pembangunan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui MusrenbangDes (musyawarah perencanaan pembangunan desa), yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan masyarakat, dan organisasi masyarakat. Tujuan penyusunan RKP Desa menurut Suprastiyo & Musta'ana (2019) antara lain sebagai: (1) dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ; (2) dasar menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun ke depan; (3) menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap program pembangunan; (4) materi untuk evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun bersangkutan; (5) tempat pengkajian bersama warga dan pemerintah desa; (6) wadah memaksimalkan penggunaan dana desa. Tujuan tersebut dapat dicapai ketika perencanaan dilakukan dengan efektif. Oleh karena itu, penyusunan RKP Desa penting dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan potensi masing-masing Desa.

Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk menciptakan desa yang terbuka, efektif, efisien, profesional, dan bertanggung jawab. Untuk mendukung penerapan undang-undang tersebut, pemerintah mengadakan program pendampingan oleh pendamping profesional yang memiliki pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2015. Namun, program Pendamping Lokal Desa (PLD) belum berjalan optimal karena wilayah pendampingan yang jauh, usia perangkat desa yang renta, dan penghasilan PLD yang belum layak (Sulistiyawati & Yuwanto, 2019). Disisi lain, hasil studi Aminah & Sutanto (2018) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya aparatur desa kurang memadai, salah satunya pada bidang perencanaan pembangunan desa.

Status desa dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM), yang juga berfungsi untuk memudahkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta lembaga negara lainnya untuk menentukan fokus dan lokus strategis sebagai target pembangunan untuk mewujudkan sasaran terentaskannya 5.000 Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal dan mewujudkan minimal 2.000 desa mandiri pada tahun 2019 (Hamidi et al., 2015). Berdasarkan data dari Kementrian Desa, salah satu desa yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan berstatus desa berkembang, serta menjadi desa mitra Universitas Negeri Malang adalah Desa Benjor (Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang), dengan nilai IDM 0,6513 pada tahun 2020, dimana sebelumnya desa ini termasuk desa tertinggal dengan nilai IDM 0,5202.

Dengan demikian, perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan RKP Desa, terutama untuk Desa Tertinggal dan berkembang. Pendampingan penyusunan RKPDes diperlukan untuk mendorong kesadaran, prakarsa, dan partisipasi masyarakat desa dalam mencapai tujuan menjadi desa mandiri yang mampu bertindak sebagai subjek pembangunan. Pendampingan dilaksanakan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif (Susanti, 2017).

METODE

Metode kegiatan ini pada dasarnya adalah diseminasi berupa pelatihan penyusunan RKPDes. Diseminasi dan pelatihan yang dilakukan menggunakan metode penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab sebagaimana dilakukan oleh Sakti (2018), ditambah dengan praktikum. Tujuan dari penerapan keempat bentuk metode tersebut adalah meningkatkan pemahaman kepada mitra pelatihan, dalam hal ini adalah aparatur desa, tokoh masyarakat, BPD, dan *stakeholder* dalam penyusunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada mitra. Peserta dalam pelatihan ini sejumlah 10 orang, karena memperhatikan protokol

kesehatan dalam rangka mencegah penularan virus COVID-19.

Kegiatan ini dilakukan menjadi 2 tahap, tahap 1 merupakan kegiatan penyampaian materi dan diskusi. Kemudian, tahap 2 merupakan kegiatan lanjutan diskusi dan evaluasi. Materi dalam kegiatan ini meliputi proses penyusunan RKPDes mulai dari keterkaitan dokumen RKPDes dengan dokumen perencanaan lainnya, mekanisme penyusunan RKPDes, sistematika RKPDes, sampai dengan evaluasi hasil pelatihan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman peserta atas pelatihan yang dilakukan. Proses evaluasi ini dilakukan dengan meminta para peserta untuk menyusun sebuah program dan kegiatan (disertai target) sesuai prioritas yang telah ditentukan. Lokasi mitra adalah Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Wilayah ini merupakan desa yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, serta sangat potensial untuk dikembangkan Desa wisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan ini dibagi menjadi dua tahapan hasil yaitu Diseminasi dan Praktik Penyusunan Program Kegiatan. Secara lebih detail dapat dijabarkan berikut ini:

Diseminasi terkait Penyusunan RKP Desa

Langkah awal pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah proses identifikasi masalah yang dilakukan dengan cara survey ke lokasi mitra. Dari hasil survey terkait dengan penyusunan RKPDes, penyusunan dokumen perencanaan tersebut di Desa Benjor hanya dilakukan berdasarkan RKPDes tahun sebelumnya. Dengan kata lain, selama ini Desa Benjor Menyusun RKP hanya dengan *copy and paste* dari RKP sebelumnya. Dari proses ini, tim pengabdian juga diberikan Salinan RKP desa tahun 2020 yang telah disahkan. Salinan tersebut digunakan sebagai dasar dan bahan pelatihan penyusunan RKPDes.

Tahap berikutnya dilanjutkan dengan kegiatan inti yakni penyampaian materi dan pelatihan penyusunan RKP Desa. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 September

2020 bertempat di lokasi mitra, yakni Kantor Desa Benjor.



Gambar 1. Penerapan Protokol COVID-19

Kegiatan pelatihan penyusunan dokumen RKPDes disampaikan pada masing-masing bab. Materi pertama BAB PENDAHULUAN disampaikan oleh Ermita Yusida, S.E., M.E. terdiri dari Latar Belakang penyusunan dokumen, Dasar Hukum penyusunan dokumen, Visi-Misi Desa, Maksud dan Tujuan penyusunan RKPDes, disertai Sistematika penyusunan RKPDes. Materi kedua, BAB Kebijakan Keuangan Desa, dipaparkan oleh Dr. Agus Sumanto, S.E., M.SA, yang berisi kebijakan pendapatan dan belanja desa. Materi ketiga tentang Evaluasi Kinerja RKPDes Tahun sebelumnya dipaparkan oleh M. Hasyim Ibnu Abbas, S.E., M.Sc. Materi keempat, yang memuat Kebijakan dan Program Pembangunan Desa, dipaparkan oleh Santi Merlinda, S.E., M.E, berisi tentang Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa. Pada materi ini, dijelaskan bagaimana cara menyusun prioritas pembangunan, bersumber dari evaluasi kinerja pembangunan tahun lalu yang disinergikan dengan hasil musrenbang dan kebijakan tahunan.



Gambar 2. Sesi Penyampaian Materi

Dalam pelaksanaan kegiatan, semua peserta terlihat sangat antusias dalam

mengikuti penyampaian materi. Dengan disampaikannya materi-materi tersebut, para peserta mulai bisa menyadari pentingnya sebuah perencanaan dalam membangun desa. Antusiasme peserta ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan yang ditanyakan kepada pemateri yang bertugas.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih detail, para peserta kemudian diberikan contoh bagaimana melakukan penyusunan program dan kegiatan (disertai target) berdasarkan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Penyusunan program prioritas dan kegiatan desa yang disesuaikan dengan visi-misi desa. Keterlibatan kepala desa dan para perangkat desa, dan para pengurus organisasi masyarakat di Desa Benjor dalam kegiatan ini semakin menguatkan pentingnya penyusunan program dan kegiatan dalam RKPDes. Selain itu, sesi pelatihan ini juga memperhatikan aspek partisipatif karena tiap unsur-unsur pemerintahan Desa Benjor ada yang mewakili.

Praktik Penyusunan Program dan Kegiatan dalam RKP Desa Benjor

Kegiatan hari kedua yaitu praktik penyusunan program dan kegiatan disertai dengan target pada RKP Desa Benjor, sebagaimana yang telah dicontohkan dalam hari pertama. Para peserta mencoba untuk menyusun program melalui diskusi dengan pemateri, ataupun secara mandiri. Pada tahapan ini, setiap peserta diminta untuk menyusun satu jenis program dan satu jenis kegiatan. Para peserta melakukan praktik ini dengan antusias. Selanjutnya, hasil penyusunan para peserta ini dievaluasi dan dibahas bersama pemateri sebagai saran untuk masukan program dalam RKP Tahun selanjutnya (2021).

Selain melakukan praktik penyusunan program dan kegiatan, pemateri juga memberikan masukan dan evaluasi terhadap penulisan RKPDes Tahun 2020. Secara keseluruhan, masukan yang diberikan oleh pemateri terhadap RKPDes Tahun 2020 sekitar 30 persen. Hal ini dapat menjadi masukan untuk penyusunan RKPDes Tahun 2021. Masukan yang diberikan terkait penulisan evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya, yang seyogyanya dituliskan hasil yang telah dicapai, kemudian

dibandingkan dengan target capaian. Selanjutnya, mengenai prioritas pembangunan dan program kegiatan, sebaiknya menyesuaikan dengan kondisi, permasalahan dan kebutuhan pada tahun yang bersangkutan. Selain itu, perlu dituliskan dengan jelas apa yang mendasari penetapan prioritas dan program kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan, situasi dan kondisi Desa akan selalu berkembang dan berubah. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis kebutuhan Desa dengan mengaitkan antara permasalahan, kebutuhan dan potensi Desa untuk mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dalam artian lain aktivitas perekonomian akan semakin meningkat (Pacione, 2014).

Melalui pelatihan ini, diharapkan tidak hanya sekretaris desa yang bisa menyusun program dan kegiatan, karena setiap individu yang menjadi masyarakat dapat berpartisipasi memberikan usulan program pembangunan berdasarkan permasalahan pada wilayahnya masing-masing (Muldi, 2018). Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Hassan et al. (2011), bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan *sharing* informasi, penetapan tujuan/ kebijakan, pengelompokan anggaran, maupun program. Dengan arti lain, masyarakat aktif terlibat mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

Kemudian, tahapan akhir dari kegiatan pengabdian ini adalah evaluasi. Pada tahap ini, tim memberikan angket kepada seluruh peserta yang berjumlah 10 orang, terkait dengan pemahaman dan tindak lanjut pelatihan penyusunan RKPDes yang telah dilaksanakan. Secara umum, para peserta menyatakan bahwa pelatihan ini bermanfaat. Artinya, pelatihan ini meningkatkan pengetahuan terkait penyusunan RKPDes. Hal ini selaras dengan pernyataan Tiza dan Taus (2019), bahwa hasil yang dicapai dari pelatihan penyusunan RKPDes di Desa Lemun berupa peningkatan pemahaman dan kemampuan dalam menyusun RKPDes. Dengan kebermanfaatan program ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang masih rendah di wilayah pedesaan (Riristuningsia, 2017) menjadi lebih tinggi.

Rincian dari hasil angket yang diberikan, didapatkan hasil bahwa 2 orang merasa pelatihan ini “cukup bermanfaat”, 4

orang merasa “bermanfaat”, dan sisanya 4 orang merasa pelatihan ini “sangat bermanfaat”. Dari hasil penyebaran angket terkait dengan tindak lanjut juga didapatkan hasil bahwa 8 orang menjawab ‘perlu ada pendampingan agar lebih yakin’ dari tim pengabdian saat Desa Benjor Menyusun RKPDes yang baru, 2 orang menjawab ‘tidak perlu karena sudah paham’.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pelaksanaan seluruh rangkaian pengabdian kepada masyarakat pelatihan penyusunan RKPDes, kita bisa simpulkan bahwa unsur-unsur pemerintah desa tidak semuanya paham tentang penyusunan RKPDes yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Desa Benjor. Penyusunan dokumen RKPDes Benjor selama ini hanya menduplikasi tahun sebelumnya dengan sedikit perubahan. Dengan adanya pelatihan ini, salah satu manfaat yang dirasakan oleh perangkat desa Benjor beserta semua unsur masyarakat yang terlibat dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa adalah memiliki tambahan pengetahuan tentang penyusunan RKPDes. Kegiatan pengabdian ini pada dasarnya masih perlu untuk dilanjutkan agar tercipta kesinambungan, dengan cara melakukan pendampingan dalam penyusunan RKP Desa Benjor. Dengan demikian, akan tercipta suatu perencanaan pembangunan desa yang inklusif, dan memiliki unsur keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S., & Sutanto, H. P. (2018). Analisis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 2(3), 149-160.
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2 (2), 135-147.
- Arsyad, L., (2002). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Cristian, H. 2015. Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2013 Di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan

- Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 3 (1) ; 190-210.
- Garis, R. R. (2017). Analisis Implementasi 4 Program Prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Di Kabupaten Ciamis (Studi kasus pada lima desa di Kabupaten Ciamis). *MODERAT (Modern Dan Demokratis)*, 3 (2), 108–130.
- Hamidi, H., et.al. (2015). *Indeks Desa Membangun 2015*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Hassan, G. F., El Hefnawi, A., & El Refaie, M. (2011). Efficiency of participation in planning. *Alexandria Engineering Journal*, 50 (2), 203-212.
- Khoeriyah, E. (2020). Kebijakan Rencana Pembangunan Desa sebagai Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Cidokom. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7 (2), 102-114
- Muldi, Ail. (2018). Komunikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Musrenbang (Studi Kasus RKPD Jabar Online). *Jurnal Dakwah Risalah*, 29 (2), 81-95
- Pacione, M. (2014). The power of public participation in local planning in Scotland: the case of conflict over residential development in the metropolitan green belt. *GeoJournal*, 79, 31–57
- Purbasari, H., D, F. R., & Habibah, U. (2018). Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja. *Prosiding: The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018 "Pemberdayaan dan Penguatan Daya Saing Bisnis dalam Era Digital"*, 623–631.
- Riristuningsia Detha, et.all. (2017). Public Participation in Rural Development Planning. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9 (1), 57-65
- Sakti, Bayu Purbha. (2018). Training of Scientific Papers Writing On Students of Widya Dharma University. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (1), 7-12.
- Srirejeki, K. (2015). Tata Kelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15 (1), 33-37
- Sulistiyawati., & ., Yuwanto. (2019). Pendampingan dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. *Journal of Politic and Government Studies*, 8 (04), 311-320.
- Supeno, Wahjudin. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu Edisi Revisi*. Banda Aceh: Read Indonesia
- Suprastiyo, A., & Musta'ana. (2019). Implementasi Penyusunan Rencana Kerja (RKP) Desa (Studi Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2 (2), 255-263
- Susanti, M.H. (2017). Peran Pendamping Desa dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. *Jurnal Integralistik*, 1 (28), 29-39
- Tarigan, Robinson. (2009). *Perencanaan Pembangunan Wilayah, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Tiza Agustinus Longa dan Taus, Wilfridus. (2019). Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desadi Desa Lemun Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara. *SABDAMAS*, 1 (1), 271-277
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Yogyakarta: Media
- Wiratnolo, R. R. & Nugroho, R. (2006). *Manajemen pembangunan Indonesia: Sebuah pengantar dalam panduan*. Jakarta: Elex Media Komputindo Pressindo.
- Wulandari, L. (2017). Strategi Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3 (3), 55-66